**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam situasi ekonomi keterbukaan (*open economic*), pasar domestik Indonesia sangat terkait dengan perkembangan antar negara yang semakin liberal. Dengan demikian dalam era perekonomian yang semakin mengglobal, legitimasi semakin kuat seiring dengan implementasi globalisasi dan liberalisasi melalui bentuk blok perdagangan/kawasan perdagangan di berbagai kawasan dunia. Sejalan dengan hal tersebut, muncul kerjasama antar negara yang saling berdekatan secara regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asia Nations).

Disepakatinya Visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di antara negara-negara anggotanya.[[1]](#footnote-1)

Komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada Pertemuan Puncak di Bali Oktober 2003, atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II, di mana para pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020.[[2]](#footnote-2)

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (*ASEAN Economic Ministers Meeting* – AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkan ke dalam gagasan pengembangan sebuah cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan di mana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas.

Dengan demikian, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020, di mana di dalamnya terdapat konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi. Sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar dalam upaya pembentukan komunitas ini. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi; sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global.[[3]](#footnote-3)

Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima elemen inti dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan.[[4]](#footnote-4)

Dalam konteks penciptaan perekonomian kawasan yang kompetitif, beragam langkah strategis telah ditetapkan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti pengembangan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, kerjasama regional dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan langkah-langkah lainnya seperti kerjasama regional dalam pembangunan infrastruktur. Begitu juga halnya dalam upaya transformasi ASEAN menuju sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, kesepakatan negara-negara di kawasan ini mengupayakan percepatan pengembangan usaha kecil dan menengah serta perluasan Inisiatif Integrasi ASEAN (*Initiative for ASEAN Integration*) dalam rangka menjembatani jurang kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. Sementara itu, langkah-langkah menuju integrasi ekonomi Asia Tenggara ke dalam perekonomian global ditempuh melalui penerimaan suatu pendekatan yang koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, termasuk negosiasi dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi strategis. Cetak biru inilah yang melandasi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui langkah-langkah spesifik dengan periode waktu yang terperinci, di mana terciptanya suatu perekonomian kawasan yang terintegrasi atas dasar prinsip perekonomian pasar bebas dan terbuka menjadi cita-cita besar yang ingin dicapai.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi sebuah tangtangan dan sekaligus peluang untuk mengembangkan produk dalam negeri bersaing dipasar ASEAN. Pemerintah Indonesia secara resmi telah meminta ASEAN benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap aturan asal barang (*Letter of Origin*) dalam imlementasi MEA 2015 yang akan mendorong penggunaan bahan baku yang berasal dari ASEAN dan mewujudkan pasar tunggal berbasis produksi ASEAN.

Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar di ASEAN dan dalam implementasi AEC (*Asean Economi Community*)/ *Masyarakat Ekonomi ASEAN* (MEA) pemerintah Indonesia akan terikat dengan perjanjian untuk tidak dapat melarang peredaran produk yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ASEAN. Dalam konteks ini, daya saing produk Indonesia dituntut dan dipacu untuk mampu menghadapi serbuan berbagai produk sejenis di pasar tunggal MEA termasuk produk-produk industri. Pelaku industri di dalam negeri diminta untuk mempersiapkan diri karena semua aturan ekonomi akan terintegrasi dan diberlakukan sama pada semua negara anggota.

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industri dinilai selalu memiliki nilai tukar yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan produk-produk sektor lain (Dumairy, 1997:227).

Hingga saat ini, sektor industri telah memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan ekspor dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Ini memberikan arti bahwa kontribusi pertumbuhan nasional dari sektor industri masih sangat besar. Dengan demikian, apabila kinerja pada sektor industi ini mengalami gangguan, maka secara tidak langsung perekonomian nasional juga ikut terganggu.

Industri yang selama ini cukup menjadi andalan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia adalah industri **Tekstil dan Produk Tekstil** (TPT). Sektor Industri tekstil dan produk  tekstil merupakan salah satu industri yang diutamakan untuk dikembangkan karena memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penyumbang devisa negara, menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar, dan sebagai industri  yang diandalkan  untuk memenuhi  kebutuhan  sandang nasional.

Tekstil adalah benang dan serat yang diolah untuk menjadi bahan pakaian dan bahan olahan lainnya. Sedangkan produk tekstil adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari tekstil seperti pakaian jadi maupun setengah jadi dan keperluan industri lainnya. Hasil industri tekstil dan produk tekstil Indonesia yang selanjutnya disebut TPT (Tekstil Produk Tekstil). Tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu produk ekspor utama Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai ekspor nonmigas Indonesia.[[5]](#footnote-5)

Indonesia adalah Negara yang sangat berkepentingan dalam mempertahankan industri TPT-nya, dimana industri TPT adalah salah satu industri perintis dan merupakan tulang punggung manufaktur di Indonesia. Peran industri TPT cukup besar dalam perekonomian karena memberikan kontribusi sebesar 1,8 persen terhadap PDB. Selain itu industri TPT menyerap tenaga kerja sebesar 10,6 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur. Investasi industri TPT cenderung naik setiap tahun hingga triwulan III 2014, investasi di sektor TPT mencapai US$ 359 juta untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp 887 miliar untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pertumbuhan industri TPT Indonesia menunjukan adanya kegiatan ekspor kepada negara-negara lain, nilai ekspor industri TPT pada tahun 2014 mencapai US$ 9,13 milyar atau masih surplus dibandingkan impor senilai USD 5,8 milyar. Khususnya ASEAN yang merupakan basis ekonomi regional yang menjadi salah satu tempat bernaungnya produk – produk tekstil Indonesia. Industri TPT Indonesia mengalami peningkatan nilai ekspor dikawasan ASEAN mencapai 10% senilai 1,3 milliyar US$ pada tahun 2011, yang sebelumnya sudah mencapai 7% di tahun 2010 sebesar 300 juta US$. Tujuan utama dari ekspor TPT Indonesia di ASEAN adalah Malaysia, dengan konsumsi 32,8% dari total ekspor TPT Indonesia. (BKPM n.d.)

Sebagai salah satu negara produsen dan eksportir produk-produk tekstil, Indonesia memandang bahwa perdagangan dunia merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor produk-produk tekstil. Di sisi lain hal ini dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan daya saing agar dapat menghasilkan produk-produk tekstil yang semakin kompetitif di pasar internasional.

Integrasi ekonomi kawasan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perdagangan tekstil dan produk tekstil Indonesia jika dimanfaatkan secara optimal. Pasar negara-negara dengan penduduk berdaya beli tinggi seperti Malaysia, Singapura dan Thailand bisa dimanfaatkan. Pelaku industri tekstil dalam negeri akan bisa secara optimal memanfaatkan peluang pasar dari integrasi ekonomi ASEAN bila pemerintah memberikan dukungan yang diperlukan untuk memperkuat daya saing.

Negara-negara ASEAN dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk-produk sektor industri berbeda-beda, hal tersebut tergantung dari jumlah produksi, jumlah konsumsi, kualitas dan kuantitas faktor-faktor produksi dan kemampuan daya saing masing-masing negara yang berbeda-beda. Ada negara yang mampu menguasai pangsa pasar industri sehingga dalam menyuplai produk industri relatif cepat dan ada pula negara yang tidak mampu untuk mengikuti persaingan dipasar global.

Oleh sebab itu diperlukan adanya dukungan pemerintah, pelaku usaha, maupun instansi terkait secara sinergis sehingga diharapkan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia akan dapat bersaing, berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian akan terwujud kondisi yang kondusif dalam melanjutkan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka stabilitas ekonomi.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, penulis memilki ketertarikan untuk mengkaji mengenai strategi dan kebijakan pemerintah terhadap industri TPT (Tekstil Dan Produk Tekstil) Indonesia dalam pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang tertuang dalam skripsi berjudul: **“Pengaruh Pemberlakuan Pasar Bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan Implikasinya bagi produk Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia.”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kebijakan pasar bebas MEA bagi Industri TPT Indonesia?
2. Sejauhmana persaingan Industri TPT Indonesia di pasar bebas MEA?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia di pasar bebas MEA?
4. **Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah bagi penulis dalam pemecahaanya, serta agar tidak terjadi pembahasan yang begitu meluas karena berbagai fenomena diseputar masalah penelitian, maka diperlukan batasan-batasan agar permasalahan yang diajukan mencapai target dan tidak keluar dari topik pembahasan yang sedang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan dengan mengkaji upaya-upaya dalam mengembangkan industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia agar dapat berkompetisi di pasar bebas MEA.

1. **Rumusan Masalah**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diperlukan adanya perumusan secara operasional sebagai *research problem* dari masalah yang dideskripsikan diatas dengan memakai landasan dan identifikasi masalah serta pembatasan masalah untuk memudahkan penganalisaan permasalahan yang sedang dibahas. Untuk itu penulis merumuskan *research problem* dari permasalahan tersebut sebagai berikut: **Bagaimana strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif agar Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia dapat bersaing di pasar bebas MEA.**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pasar bebas MEA bagi industri TPT Indonesia
2. Untuk mengetahui persaingan Industri TPT Indonesia di pasar bebas MEA
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengembangkan TPT Indonesia di pasar bebas MEA
4. **Kegunanaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya dalam perdagangan Internasional
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berpedoman pada metode teknik, sekaligus mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan penulis selama menuntut ilmu di jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan
3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana Strata Satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Di dalam penelitian dibutuhkan kerangka teoritis dalam mengkaji fenomena yang ada. Kerangka teoritis diharapkan dapat mengukur pengetahuan baik secara teratur ataupun sistematis. Dengan kata lain, teori akan membantu membentuk kerangka pemikiran dalam upaya memaksimalkan penelitian. Pemaparan dibawah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi analisa suatu kasus secara lebih mendalam.

Sebagai awal pembahasan, dalam memahami dinamika interaksi antar negara tidak akan lepas dari kajian studi hubungan internasional, dimana terdapat fenomena-fenomena kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik pada tingkat global. Pola-pola interaksi tersebut dilakukan oleh banyak negara yang menunjukan awalnya interaksi dalam masyarakat internasional.

Hubungan Internasional atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *International Relation*, yang berasal dari kata *inter* yang berarti antar, *nation* berarti bangsa, dan *relation* berarti hubungan, yang dapat mengandung arti juga suatu hubungan strategidiplomatik antar negara, dan fokus karakteristik dari hubungan internasional dapatdikatakan bermacam-macam seperti, pada isu perang dan perdamaian, serta konflikdan kerjasama.Adapun pengertian lain tentang hubungan internasional ini adalah tentangtransaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial, dan ilmu hubunganinternasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau operasi dari institusi ataulembaga *non-state*. Hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang jugamempelajari sebab dan akibat dari hubungan antar suatu negara (Perwita & Yani,2005 : 4). Adanya hubungan antar negara dapat disebabkan oleh adanya perbedaansumber daya antara negara yang berbeda. Hubungan atau kerjasama juga dapat terjadiakibat saling ketergantungan (*interdepensi*) untuk dapat saling memenuhi kebutuhanantara suatu negara dengan negara lain.

Ilmu hubungan internasional juga merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional, hubungan atau interaksi yang melintasi batas negara adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional (Rudy, 1993: 3). Menurut Holsti dalam bukunya “Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis” :

**“Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu” (Holsti, 1987 : 29).**

Menurut aliran tradisionalais dalam buku **“*Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*”** menyatakan bahwa hubungan internasionaladalah, studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulatyang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis, 1999 : 24).

Hubungan Internasional juga menurut Mas’oed dapat didefenisikan sebagai berikut, yaitu:

**“Studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional” (Mas’oed, 1994 : 28).**

Pada masa sekarang ini sebagai bentuk dari perdagangan internasional dalam wujud organisasi internasional telah banyak dilakukan untuk berbagai macam kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan. Organisasi Internasional atau *Internasional Organization* adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya.

Organisasi internasional moderen, mulai muncul lebih dari satu abad yang lalu di negara barat, yang berkembang di abad ke-20, yaitu di jaman kerjasama internasional. Dua jenis organisasi internasional yang dikenal antara lain, organisasi publik antara dua negara atau lebih, serta organisasi swasta yang lebih dikenal dengan organisasi *non* pemerintahan (NGO) (Kamus Hubungan Internasional, 1999 : 271).

Pengertian organisasi internasional, secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai :

***“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities”.***

**(Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara,umumnya berlandaskan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balikyang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatanstaf secara berkala) (Cheever dan Haviland Jr, 1967 : 6 dalamRudy, 2009 : 2-3).**

Seperti menurut pengertian sederhana di atas yang dapat di bagikan kedalam suatu unsur, organisasi internasional mencakup adanya tiga unsur, yaitu :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang berkerja sebagai pegawai sipil internasional.

Dari ketiga unsur-unsur diatas, perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan melibatkan negara berserta pemerintahan saja. Namun negara tetap merupakan aktor yang paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, akan tetapi perlu juga diakui adanya eksistensi organisasi-organisasi *non* pemerintahan yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

Dengan demikian, organisasi internasional, akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut :

**“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2009 : 3).**

Jika dilihat dari pertumbuhannya, organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antara bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antara negara dan antara bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan perlu di usahakan secara bersama-sama.

Dalam organisasi internasional dapat tercipta hubungan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan bernegara salah satunya yang paling penting adalah kehidupan ekonomi. Kerjasama ekonomi ini dapat terjadi antara pemerintah negara satu dengan yang lainnya atau orang perorangan (perusahaan). Kerjasama ekonomi ini biasa disebut dengan ekonomi internasional. Nopirin menyebutkan:

**“Ekonomi internasional mempelajari aplikasi daya langka guna memenuhi kebutuhan manusia yang dielajari dalam hubungan antar pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar dua negara tersebut maupun beberapa negara.”[[6]](#footnote-6)**

Melalui kerjasama ekonomi dapat mempersempit kepentingan ekonomi internasional serta upaya mencari solusi dari pada problematika ekonomi yang dihadapi suatu negara melalui dialog., perundingan dan pertukaran pandangan untuk meningkatkan intensitas kerjasamamnya sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat dijadikan pemicu dalam memajukan perekonomiannya. Oleh karena itu kerjasama ekonomi sering disebut sebagai aspek fundamental dalam kerjasama internasional. Dominick Salvatore menyebutkan “ekonomi internasional adalah aktivitas yang timbul oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unut-unit politik yang melintasi batas-batas negara dan bersifat internasional”.[[7]](#footnote-7) masalah ekonomi muncul bersamaan dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, kembali Dominick Salvator memberi batasan mengenai ekonomi internasional, yang mengatakan “ekonomi interasional membahas hubungan antar negara-negara saling ketergantungan (*interdependence*) yang timbul sebagai akibat dari pada kepentingan terhadap kesenjangan ekonomi dihampir semua negara di dunia yang semakin meningkat”.[[8]](#footnote-8)

Dalam kerjasama ekonomi ineternasional, negara-negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya maka dilakukanlah sebuah bentuk perdagangan diantara negara-negara lainnya yang melintasi batas-batas negara, yang disebut sebagai perdagangan internasional.

Perdagangan merupakan suatu proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang melakukan pertukaran. Kesediaan kedua belah pihak untuk bertransaksi akan menimbulkan keinginan masing-masing pihak semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya agar dapat bersaing di pasar global. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat digunakan untuk membantu dalam menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antar dua atau lebih negara serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian negara tersebut.

Perdagangan internasional juga merupakan kegiatan memperdagangkan output barang-barang dan jasa, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain (Deliarnov, 1995: 3). Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dan jasa yang terjadi melampaui batas-batas negara. Perdagangan internasional sangat diperlukan untuk mendapatkan manfaat yang dimungkinkan oleh spesialisasi. Masing-masing negara akan memproduksi barang dan jasa yang dapat dilakukan secara efisien, sementara negara tersebut akan berdagang dengan negara lain untuk memperoleh barang dan jasa yang diproduksinya (Lipsey, 1997: 5).

Adam smith dalam Hady (2004) menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional (*gain from trade*) karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang yang tidak ada keunggulan mutlak di negara tersebut.

Menurut Hendra (2002): **“perdagangan internasional bisa terjadi apabila kedua belah pihak memperoleh manfaat atau keuntungan dari dalam perdagangan tersebut (*gains from trade*)”.**

Menurut Basri dan Munandar (2010), bahwa:

**“Perdagangan internasional terjadi karena dua alasan utama. Pertama, negara-negara yang berdagang karena memiliki sumber daya yang berbeda satu sama lain. Kedua, negara-negara melakukan perdagangan dengan tujuan skala ekonomi (*economies of scale*) dalam produksi”.**

Berdasarkan yang dikatakan para ahli tersebut mengartikan, jika setiap negara memproduksi barang tertentu, negara tersebut dapat memproduksi barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan lebih efisien dibandingkan dengan negara yang memproduksi semua barang. Maka perdagangan internasional merupakan suatu perdagangang antara negara-negara dimana meliputi proses ekspor maupun impor yang menjadi salah satu pengaruh bagi pendapatan negara.

Dalam melakukan sebuah perdagangan, negara memiliki alasan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan dan bertujuan agar dalam proses produksi dilakukan dengan skala ekonomis sehingga negara dapat berdagang satu sama lainnya. Dengan demikian aliran kaum klasik yakni Adam Smith dan David Ricardo mengemukan teori *Absolute Advantage* (Keunggulan Mutlak) dan *Comparative Advantage* (Keunggulan Komparatif).

1. **Teori *Absolute Advantage* (Keunggulan Mutlak)**

Adam Smith berprinsip bahwa,

**“pendapatnya merupakan pengkoreksian dari kelemahan kaum merkantilisme terhadap pernyataan surplus perdagangan internasional sebagai suatu doktrin. Surplus Perdagangan dilakukan dengan memanfaatkan sepenuhnya sumberdaya alam yang tersedia. Akan tetapi smith berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam sepenuhnya kelak akan membahayakan negara itu sendiri, yaitu berupa peningkatan impor secara besar-besaran”.**

Jadi inti dari teori ini adalah suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis atau beberapa jenis barang tertentu, dimana negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut dan melakukan impor dengan jenis lain dimana negara tersebut dengan tidak memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang lain (Tambunan:2001).

Maka yang dimaksud dengan teori *Absolute Advantage* (Keunggulan Mutlak) ialah bahwa tenaga kerja sebagai input produksi sekaligus mengukur nilai suatu barang, sedangkan untuk upah tenaga kerja pada masing-masing negara tidak diperhitungkan.

1. **Teori *Comparative Advantage* (Keunggulan Komparatif)**

David Ricardo mengkritik teori *Absolute Advantage* oleh Adam Smith bahwa *Absolute Advantage* sangat sederhana sekali. Menurut David Ricardo (1817) mangatakan

**“Perdagangan internasional bisa saja terjadi walaupun negara tidak mempunyai keunggulan mutlak, akan tetapi mempunyai keunggulan komparatif dari negara lain.”**

Adabeberapa asumsi yang membangun konsep komparatif oleh David Ricardo, yakni:

1. Dua negara masing-masing memproduksi dua jenis komoditi dengan hanya menggunakan satu faktor produksi tenaga kerja.

2. Kedua komoditi bersifat identik (homogen).

3. Kedua komoditi dapat dipindahkan antar negara dengan biaya transportasi nol.

4. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun heterogen tidak identik antar negara.

5. Tenaga kerja dapat bergerak antar industri dalam suatu negara namun tidak

antar negara.

6. Pasar barang dan pasar tenaga kerja dalam kondisi persaingan sempurna.

Dari teori di atas bahwa proses perdagangan internasional terjadi karena adanya keunggulan oleh suatu negara yang menghasilkan sesuatu barang dengan biaya yang rendah atas penggunaan input tenaga kerja.

Perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan sistem pembagian kerja internasional yang saling menguntungkan karena setiap negara akan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya paling menguntungkan.

Skindrome and Lairson memberikan pengertian tentang perdagangan bebas sebagai berikut:

**“Free trade is a variant on the nation of free market and is probably the most important contribution that liberals make to study of internasional political economy. The central assertion is understicted, production will take place where it is most efficiently done and all nations will benefit. Standing behind this view is a concept of allocating resources to the production of goods in the most efficient way, that is a division of labour operates among nations so that each concentrates on the set of goods to wich it is best suited as compared with other nations and with all the kinds of goods it could produces. Economist focus their assasement of the benefits and coasts trade on efficiency and the lowest prices for goods and focus less on the politically relevant coasts of the economics adjustments that people must make ton satisfy the demands of free trade.”**

Sebagai sebuah paradigma pembangunan ekonomi, neoliberalisme hadir sebagai metamorfosa paradigma liberal yang merupakan ruh yang mendasari gerakan terbentuknya komunitas disuatu kawasan. Neoliberalisme berasumsi bahwa entitas pasar merupakan aktor yang paling relevan dan efektif dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. sebaliknya, mereka memandang bahwa intervensi negara dalam hal ini pemerintah terhadap perekonomian, melalui subsidi misalnya, merupakan hambatan yang mendistorsi berjalannya mekanisme pasar.

Neoliberalisme adalah paham ekonomi yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan BUMN, penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dsb.[[9]](#footnote-9)

Terdapat tiga pilar utama paradigma neoliberalisme, yaitu disiplin fiskal (*fiscal austerity*), privatisasi dan liberalisasi pasar bebas. Kebijakan-kebijakan pembangunan dari paradigma ini didasarkan pada sebuah model sederhana ekonomi pasar, model ekuilibrium kompetitif, yang berakar pada prinsip “*invinsible hand*” Adam Smith yang diasumsikan bekerja dengan sempurna. Adapun asumsi-asumsi dasar dari paradigma ini antara lain adalah meletakkan pasar sebagai aktor atau pelaku utama dalam ekonomi; liberalisasi pasar dalam bentuk kebebasan pergerakan barang, jasa, investasi dan modal tanpa adanya intervensi negara; menghilangkan semua pengeluaran negara untuk pemenuhan kebutuhan publik (*public goods*) atau meminimalisirnya secara bertahap; deregulasi semua kebijakan negara yang membatasi mekanisme pasar; privatisasi dengan menjual aset-aset negara kepada pasar. Neoliberalisme juga menjadi paradigma yang dianut oleh trinitas rezim ekonomi internasional yang sangat berpengaruh, yaitu IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO).

Neoliberalisme menekankan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi sebagai imperatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan kemiskinan. Dalam pencapaian pertumbuhan tersebut, paradigma ini meletakkan prioritas pada pertambahan input kapital dan tenaga kerja semata-mata, di mana faktor kemajuan teknologi dipandang sebagai faktor eksogen dan mengabaikan faktor-faktor di luar ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan.[[10]](#footnote-10)

Terjadi sebuah pengaruh yang penting dalam perekonomian dunia yang dapat ditimbulkan, pengaruh itu sendiri adalah suatu keadaan hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.

Teori pengaruh menurut Mochtar Masoed menjelaskan bahwa:

**“Teori hubungan internasional dibentuk melalui pengembangan preposisi-preposisi tentang perilaku rasional berdasarkan suatu motif dominan seperti kekuasaan.”[[11]](#footnote-11)**

Sedangkan menurut **James Lee Ray** menjelaskan bahwa **“power sebagai influence (pengaruh), mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku dan menekankan sulitnya menentukan pihak mana yang lebih kuat.”** Serta menurut **Hans J. Morgenthau** menjelaskan bahwa **“pengaruh yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain.[[12]](#footnote-12)**

Dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara maka setiap negara akan beruasaha menentukan arah kebijakan yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab (Friedrich dalam Wahab, 2004:3) bahwa:

**“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”**

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menitik beratkan proses modernisasi dan perkembangan kedalam suatu strategi, seperti yang dikatakan oleh H. Bintaro Tjokroaminoto, bahwa:

**“Strategi adalah keseluruhan langkah atau kebijaksanaan dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu persoalan.”**

 Jack Plano menegaskan lagi tetang strategi dalam bukunya Kamus Analisa Politik, sebagai berikut:

**”Strategi merupakan suatu ancang-ancang untuk mengalahkan lawan atau bentuk untuk mencapai tujuan lain. Strategi biasanya mengacu pada rencana yang menyeluruh atau yang mencakup serangkaian gerakan yang berlangsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Sebaliknya taktik terdiri dari gerakan tunggal atau serangkain langkah terbatas, kearah tujuan antara intermediate didalam perencanaan strategi yang luas.”**

Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang telah dipersiapkan dan dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Didasarka pada uraian diatas, penulis mengemukakan asumsi sebagai berikut:

1. Industri TPT merupakan sektor yang paling siap dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), produksi tekstil nasional sudah memiliki pasar tersendiri di pasar domestik begitu pun dengan pasar ekspor. Dengan adanya MEA justru bisa menjadi peluang bagi industri tekstil untuk memperluas pasar.
2. Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia siap menyerbu pasar Asia Tenggara sebab, struktur industri tekstil di Indonesia terbilang komplet dan punya kelebihan ketimbang negara Asia Tenggara lainnya, yakni punya industri tekstil dari hulu sampai hilir, mulai produksi serat sampai pakaian jadi.
3. Kementerian perindustrian telah melakukan upaya dalam pengembangan industri TPT hulu maupun hilir mulai dari produksi serat sampai pakaian jadi. Upaya yang telah dilakukan adalah Program Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang telah berjalan sejak tahun 2007.

**2. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan atas jawaban sementra terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Di dalamnya terdapat dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris guna menemukan realibilitas atau kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa:

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah tersebut maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

**Dalam menghadapi MEA dimana seluruh perekonomian kawasan diintegrasikan dalam pasar bebas yang terbuka tanpa dibatasi oleh adanya hambatan dalam perdagangan maka pemerintah melakukan langkah yang strategis agar Industri TPT Indonesia dapat berkompetisi di pasar bebas MEA melalui restrukturisasi infrastruktur, pemberdayaan SDM, serta pemasaran dalam mendukung Industri TPT Indonesia.**

**3. Operasional VAriabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam hipotesis (teoritik) | Indikator (empirik) | Verifikasi (analisis) |
| Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  | 1. Indonesia bersama dengan sembilan negara ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Lima elemen inti dalam pembentukan MEA
3. Dalam cetak biru MEA terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan
 | 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dicanangkan sebagai suatu model integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. MEA merupakan realisasi dari keinginan yang tercantum dalam Visi 2020 untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama.
2. Sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar dalam upaya pembentukan komunitas ini. (Majalah Industri edisi 2 2013)
3. Terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil.(ASEAN Economic Community Blueprint,http://www.aseansec.org/21083.pdf)
4. Sektor prioritas tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yakni industri agro, elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Sisanya adalah lima sektor jasa yaitu transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi alias e-ASEAN. Sektor-sektor prioritas inilah yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan juga tenaga kerja terampil.(<http://nasional.kontan.co.id/news/langkah-antisipasi-pemerintah-hadapi-mea>)
 |
| Implikasinya bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia | 1. Industri TPT merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia
2. Kualitas produk tekstil Indonesia lebih baik dari produk tekstil impor.
3. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi industri TPT.
4. Program restrukturisasi mesin dan peralatan Industri
5. Peningkatan kemampuan SDM
6. Pemasaran Industri TPT Indonesia melalui promosi ke luar negeri
 | 1. Menperin Saleh Husin mengatakan bahwa, “kontribusi industri TPT terhadap PDB cukup signifikan. Hingga triwulan ketiga tahun 2015, sektor ini mampu menyumbang 1,17% terhadap PDB”
2. Industri TPT merupakan sektor penghasil devisa karena neraca perdagangannya yang selalu positif. Sampai triwulan III tahun 2015, sektor TPT telah mencatat surlpus sebesar USD 3,34 miliar dengan nilai ekspor mencapai USD 9,27 miliar dan nilai impor USD 5,93 miliar
3. Industri TPT merupakan sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang atau sekitar 10,36% tenaga kerja di sektor industri. (<http://citraindonesia.com/pemerintah-dorong-peningkatan-industri-tpt/>)

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, kualitas industri tekstil domestik sudah banyak yang lebih baik dibanding produk impor, sehingga bisa memenuhi pangsa pasar dalam negeri. (<http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Prosedur%20Notifikasi%20WTO.pdf>)1. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis diantaranya yakni, melaksanakan program restrukturisasi mesin dan peralatan Industri, peningkatan kemampuan SDM dan Pemasaran ke luar negeri. (<http://poskotanews.com/2016/01/23/menperin-industri-tekstil-berkontribusi-besar-pertumbuhan-ekonomi/>)
2. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menganggap perlu memberikan stimulan melalui kegiatan Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dalam rangka mendorong industri untuk meningkatkan daya saingnya melalui investasi mesin/peralatan yang lebih modern. (<http://www.neraca.co.id/article/51330/rp-100-m-untuk-restrukturisasi-mesin-industri-anggaran-2015>)
3. Pemerintah mengadakan pelatihan pada operator mesin garmen dengan sistem *three in one* (3 in 1) yaitu pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja serta pendirian Akademi Komunitas Industri TPT. (<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=2&date=2016-01-24>)
4. Kemenperin mendorong pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk memacu penjualan ekspor dengan memberi stimulun atau perangsang untuk melakukan terobosan pemasaran melalui promosi pada ajang pameran-pameran Internasional. (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/12530/Semua-Bisa-Berperan-Jadi->)
 |

**4. Skema Kerangka Teoritis**



1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Teknik Analisis Data**

Penggunaan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah Analisa induksionis yang unit eksplanasi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan unit analisis.

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah deskriptif analisis dan metode historis:

1. Metode Deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisiskan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang disetujui pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan dipredisi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analisis menggambarkan, mengklarifikasikan, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interprestasi data-data tersebut.
2. Metode Historis, yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpula data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-makalah, surat kabar, jurnal, buletin-buletin internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
* Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian yang dilakukan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 1 Maret 2016.

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, tingkat analisis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II OBJEK PENELITIAN FARIABEL BEBAS**

Bab II ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadkan variabel bebas, yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Adapun yang menjadi variabel bebasnya adalah mengenai pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

**BAB III OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab III ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat variabel lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikatnya adalah perkembangan Industri Tekstil dan Produk Testil (TPT) Indonesia.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indokator-indikator penelitian yang di deskripsikan dalam data (fakta maupun angka)

**BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam bentuk ringkasan yang singkat namun masih informatif.

1. ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814.htm, diakses pada tanggal 15 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. ASEAN Concord II/Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm, diakses pada tanggal 15 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. *ASEAN Economic Community Blueprint*, , <http://www.aseansec.org/21083.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. *ASEAN Economic Community Blueprint*, http://www.aseansec.org/21083.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Siahaan, Marlina Tota Juliani. 2008 *Analisis Aliran Perdagangan Tekstil Dan Produk Tekstil (Tpt) Intra-Asean.* Skripsi. Institut Pertanian Bogor [↑](#footnote-ref-5)
6. Nopirin. 1991. *Ekonomi Internasional.* Yogyakarta: BPFE. hal. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dominick Salvator, *Theory and Problem of International Economi* (terjemahan Rudi Sitompul) (Jakarta: Erlangga, 1984), hal 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dominick Salvator, *Theory and Problem of International Economi* (Saduran Rudi Sitompul) (Jakarta: Erlangga, 1986), hal. 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Desy Novitasaari dalam *Pengertian Neoliberalisme*. <http://desynovitasari92.blogspot.co.id/2013/03/neoliberalisme.html> diakses pada tanggal 17 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-9)
10. Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding the International Economic* Order (New Jersey: Princeton University Press, 2001), 112-116. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mochtar Ma’oed., hlm 24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., hlm 144-145 [↑](#footnote-ref-12)